



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam upaya mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2017-2021.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
 - c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI;
 - d. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI;
 - e. BAB V PENUTUP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 11 - 4 - 2017

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 11 - 4 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd/Cap

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 - 4 - 2017
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2017-2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan utama birokrasi di Indonesia pasca reformasi nasional telah diidentifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meliputi tujuh hal, yaitu organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih, sumber daya manusia aparatur yang kurang kompeten, kewenangan yang tumpang-tindih, pelayanan publik yang kurang berkualitas, pola pikir aparat yang minta dilayani bukan melayani, dan budaya kerja yang tidak efisien dan akuntabel. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan kinerja birokrasi, telah ditetapkan sejumlah kebijakan mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025; kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014; dan sejumlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Visi Reformasi Birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Pemerintahan kelas dunia adalah pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dalam pelayanan prima dan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan Misi Reformasi Birokrasi adalah:

- a. membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set);

- c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
- d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dan kode etik aparatur negara. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi dijabarkan sebagai berikut:

| Sasaran Reformasi Birokrasi | | Ukuran kualitatif/kuantitatif | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|
| a | Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme | 1 | Nilai Zona Integritas; |
| | | 2 | Nilai Efisiensi; |
| | | 3 | Indeks Persepsi Korupsi; |
| | | 4 | Opini BPK; dan |
| | | 5 | Indikator lain yang relevan |
| b | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | 1 | Indeks kepuasan masyarakat |
| | | 2 | Integritas pelayanan |
| | | 3 | Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan |
| | | 4 | Nilai pemeringkatan |
| | | 5 | Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDGs ; dan |
| | | 6 | Indikator lain yang relevan |
| d | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | 1 | Nilai akuntabilitas kinerja |
| | | 2 | Nilai kinerja organisasi dan |
| | | 3 | Indikator lain yang relevan |

Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam rangka menjaga kesinambungan perubahan birokrasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, perlu menyusun dokumen perencanaan reformasi birokrasi berupa Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2017-2021, yang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi ini berdasarkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Road Map Reformasi Birokrasi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya penyempurnaan rencana dan

pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintahan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

B. Tujuan

1. Memberikan kesamaan pemahaman mengenai Road Map reformasi birokrasi pada pemerintah daerah;
2. Memberikan panduan penyusunan Road Map reformasi birokrasi bagi Pemerintah Daerah.

C. Sistematika

- Bab I. Pendahuluan;** menguraikan latar belakang dan tujuan pedoman ini.
- Bab II. Gambaran birokrasi pemerintah Daerah;** menguraikan gambaran umum kondisi Daerah.
- Bab III. Agenda reformasi birokrasi;** menguraikan fokus perubahan reformasi birokrasi.
- Bab IV. Monitoring dan evaluasi;** menguraikan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan.
- Bab V. Penutup;** menguraikan catatan penutup

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

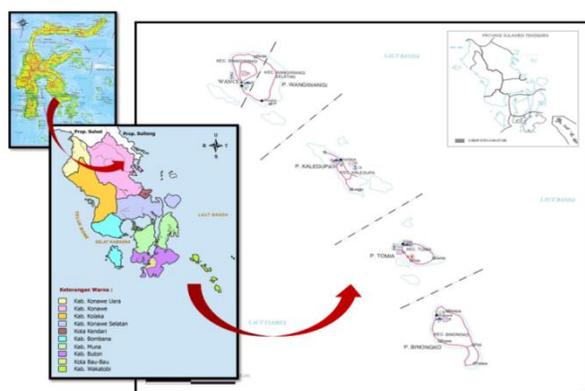
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan aspek topografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

❖ **Letak geografis,** Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara,

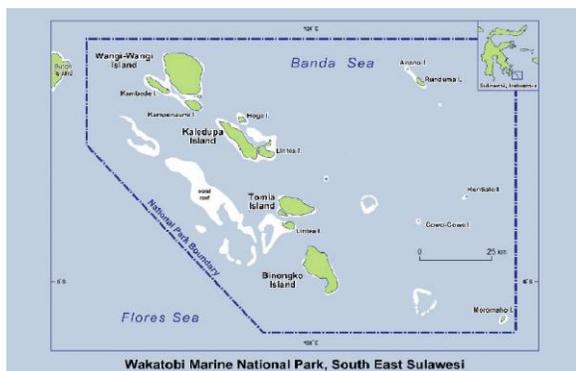
tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 5°12'–6°25' Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123°20'–124°39' Bujur Timur (sepanjang kurang lebih 120 km), sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Letak Geografis Kabupaten Wakatobi.



Posisi Geostrategis, Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis karena: (1) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten Wakatobi sangat penting karena berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki potensi sumber daya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar; dan (3) Kabupaten Wakatobi berada

❖ **Batas Administrasi Daerah**



Gambar 2. Peta Batas Wilayah Kabupaten

Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh perairan laut Buton, laut Banda dan laut Flores. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Wakatobi berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton.

B. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari daratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3%, dan luas perairan ± 18.377 km² atau sebesar 97,00% dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km² (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibukota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km² (5,53%), selengkapnya disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1: Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2016.

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas Daratan (km ²) | Prosentase (%) |
|-------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Wangi - Wangi | 14 | 6 | 241.98 | 29,40 |
| 2. | Wangi-Wangi Selatan | 18 | 3 | 206.02 | 25,03 |
| 3. | Kaledupa | 12 | 4 | 45.50 | 5,53 |
| 4. | Kaledupa Selatan | 10 | - | 58.50 | 7,11 |
| 5. | Tomia | 8 | 2 | 47.10 | 5,72 |
| 6. | Tomia Timur | 5 | 4 | 67.90 | 8,25 |
| 7. | Binongko | 5 | 4 | 93.10 | 11,31 |
| 8. | Togo Binongko | 3 | 2 | 62.90 | 7,64 |
| Total | | 75 | 25 | 823.00 | 100,00 |

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2016.

C. Topografi

Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70,00%) memiliki topografi landai, terutama dibagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utara dan selatan pulau Kaledupa, bagian Barat dan Timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko, dengan ketinggian tempat berkisar antara 3–20 meter diatas permukaan laut. Sedangkan bentuk topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulau dengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi juga membentang gunung Tindoi di pulau wangi-wangi, gunung pangilia di pulau Kaledupa, gunung patua di pulau Tomia dan gunung Watiu'a di pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut, terdapat situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. situs sejarah dimaksud ialah benteng Liya, benteng Tindoi, benteng Patu'a, dan benteng suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya. Kesemuanya merupakan aset daerah yang sangat

berharga, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.

D. Gambaran Umum Demografi

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Wakatobi per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 109.523 jiwa. Komposisi dan penyebaran penduduk Kabupaten Wakatobi menurut jenis kelamin per Kecamatan pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 110.192 jiwa atau menurun 0,61%

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016.

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. | Wang - Wangi | 13.678 | 13.401 | 27.079 |
| 2. | Wangi - Wangi Selatan | 5.954 | 5.910 | 29.354 |
| 3. | Kaledupa | 3.918 | 3.918 | 11.864 |
| 4. | Kaledupa Selatan | 4.981 | 4.951 | 8.213 |
| 5. | Tomia | 14.827 | 14.527 | 7.879 |
| 6. | Tomia Timur | 4,012 | 4.201 | 9.681 |
| 7. | Binongko | 4.822 | 4.859 | 9.932 |
| 8. | Togo Binongko | 2.761 | 2.760 | 5.521 |
| Jumlah | | 54.953 | 54.570 | 109.523 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wakatobi, 2016

Kepadatan penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2016 rata-rata 1.160 jiwa/km². dengan pertumbuhan selama 12 tahun, wilayah yang tertinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kaledupa yaitu rata-rata 261 jiwa/km², dan terendah di Kecamatan Togo Binongko, yaitu rata-rata 88 jiwa/km², selengkapnya disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut :

Tabel 3 : Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2016.

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Penduduk (jiwa) | Kepadatan (jiwa/km ²) |
|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Wang - Wangi | 241.98 | 27.079 | 112 |
| 2 | Wangi - Wangi Selatan | 206.02 | 29.354 | 142 |
| 3 | Kaledupa | 45.50 | 11.864 | 261 |
| 4 | Kaledupa Selatan | 58.50 | 8.213 | 140 |
| 5 | Tomia | 47.10 | 7.879 | 167 |
| 6 | Tomia Timur | 67.90 | 9.681 | 143 |
| 7 | Binongko | 93.10 | 9.932 | 107 |
| 8 | Togo Binongko | 62.90 | 5.521 | 88 |
| Jumlah | | 823.00 | 109.523 | 1.160 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wakatobi, 2016

2. Komposisi Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2016 adalah sebanyak **29.833** KK dan sebaran persentase penduduk Kecamatan terhadap penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2016 selengkapnya disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 : Komposisi Penduduk Menurut Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Wakatobi Tahun 2016.

| No. | Kecamatan | Kepala Keluarga | Penduduk (Jiwa) | Persentase (%) |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | Wang - Wangi | 7.358 | 27.079 | 24,72 |
| 2. | Wangi - Wangi Selatan | 7.757 | 29.354 | 26,80 |
| 3. | Kaledupa | 3.356 | 11.864 | 10,83 |
| 4. | Kaledupa Selatan | 2.380 | 8.213 | 7,50 |
| 5. | Tomia | 2.272 | 7.879 | 7,19 |
| 6. | Tomia Timur | 2.754 | 9.681 | 8,84 |
| 7. | Binongko | 2.524 | 9.932 | 9,07 |
| 8. | Togo Binongko | 1.432 | 5.521 | 5,04 |
| Jumlah | | 29.833 | 109.523 | 100,00 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wakatobi, 2016

E. Visi dan Misi

1. Visi

Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Wakatobi 5 (lima) tahun yang akan datang maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk memenuhi tuntutan dimaksud. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan visi yang dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi RPJMD yang merupakan visi Kepala Daerah Terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Wakatobi, sebagaimana terdapat dalam RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 – 2025, yaitu :

“Wakatobi Sebagai Pusat Biodiversitas Bumi”

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Wakatobi sebagaimana yang dicita-citakan. Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Wakatobi tersebut, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 – 2021 adalah :

“MENJADI KABUPATEN MARITIM YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”

Pernyataan visi mengandung makna sebagai berikut :

Kabupaten Wakatobi adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) di sektor perikanan dan kelautan, pertanian dalam arti luas serta sumberdaya alam berupa keindahan alam Kabupaten Wakatobi sebagai andalan industri pariwisata. Sumberdaya yang tersedia, seharusnya memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing masyarakat, sehingga menjadikan Wakatobi sebagai Kabupaten Maritim yang sejahtera. Karenaitu, diperlukan upaya-upaya yang konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah, dalam upaya meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi.

Maritim mengandung makna berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim.

Dalam konteks ini Kabupaten Maritim adalah Kabupaten yang dikelilingi oleh laut dan menjadikan laut sebagai bagian dari sumber kehidupan masyarakatnya.

Visi pembangunan Kabupaten Wakatobi sebagai Kabupaten Maritim merupakan kebulatan tekad dari aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola secara optimal segala potensi sumber daya kelautan yang diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan terjadi transformasi budaya masyarakat Wakatobi ke akar budayanya yaitu masyarakat maritim yang religius dan berdaya saing.

Sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun.

Daya Saing mengandung makna memiliki kemampuan, dan atau kekuatan, adalah satu kemampuan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Wakatobi maka produk yang dihasilkan harus dapat unggul secara kualitas, efisien dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan maka Wakatobi **MENJADI KABUPATEN MARITIM YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING** dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui upaya konkrit berdasarkan kemampuan dan kekuatan Wakatobi sebagai Kabupaten Maritim, dengan mengutamakan pendekatan yang bertumpu pada pembangunan manusia (people centred), pembangunan yang bertumpu pada pusat pertumbuhan dan pemerataan serta pembangunan yang bertumpu pada pelestarian budaya, sumberdaya alam dan lingkungan.

Jika dikaitkan antara visi RPJMD Kabupaten Wakatobi dengan visi RPJMD Provinsi serta visi RPJM Nasional, tampak adanya keterkaitan yang saling melengkapi. Visi RPJMN adalah : **“Indonesia yang mandiri,maju, adil dan makmur”** dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”** maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kabupaten Wakatobi, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Misi

Untuk merealisasikan visi pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka akan dikembangkan tujuh agenda utama yang juga merupakan misi pembangunan yaitu:

- a. **Mengembangkan Kualitas SDM**; dimaksudkan (1) meningkatkan kualitas pendidikan formal pada semua jenjang, (2) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (3) mengembangkan pendidikan non formal yang berbasis kemaritiman dan pariwisata;
- b. **Membangun Ekonomi yang Berbasis Kemaritiman Dan Berkelanjutan**; dimaksudkan untuk (1) mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada kearifan lokal, (2) mengembangkan perdagangan antar pulau, (3) mengembangkan

kewirausahaan, (4) mengembangkan industri jasa, (5) mengembangkan pertanian dan Ketahanan pangan;

- c. **Mengembangkan Sosial Budaya, Industri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif**; dimaksudkan untuk (1) mengembangkan sosial budaya berbasis adat-istiadat setempat (2) mengembangkan industri pariwisata berbasis sosial budaya lokal, (3) mengembangkan ekonomi kreatif;
- d. **Membangun Infrastruktur Publik**; dimaksudkan untuk (1) membangun dan mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, (2) membangun dan mengembangkan infrastruktur perekonomian dan (3) membangun dan mengembangkan infrastruktur pemerintahan;
- e. **Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi**; dimaksudkan untuk (1) mengembangkan kelembagaan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi (TIK) dan (2) mengembangkan pengelolaan data berbasis TIK;
- f. **Membangun Pemerintahan yang Inovatif dan Partisipatif**; dimaksudkan untuk (1) meningkatkan transparansi, inovasi dan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan (2) revitalisasi pemerintahan daerah, dan (3) reformasi keuangan daerah;
- g. **Mengembangkan Kolaborasi Internasional**; dimaksudkan untuk (1) mengembangkan kerja sama lembaga-lembaga internasional dan (2) membangun kerja sama kota kembar.

F. Kondisi Perekonomian Daerah.

1. Struktur Perekonomian Daerah

Kontribusi sektor primer terhadap PDRB, atas dasar harga berlaku selama empat tahun terakhir, terus mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu dengan angka persentase 0,45% pada tahun 2013 angka persentase tersebut mengalami penurunan terus menerus ketitik level terendah, yaitu 0,43% pada tahun 2016. Sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Mencapai persentase 0,21%. dari ketiga sektor tersebut yang paling besar penyumbang PDRB Kabupaten Wakatobi yaitu sektor Tersier mengalami peningkatan sebesar 0,36% dari angka PDRB, Kabupaten Wakatobi selama 3 tahun terakhir.

Perubahan tersebut mulai mengarah pada struktur ekonomi modern. dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap Struktur PDRB
Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015* | | 2016** | |
|-----|--|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | (Milyar) | (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| A. | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | | | | | | | | | | |
| I. | SEKTOR PRIMER | 921.93 | 44.89 | 1,030.63 | 44.90 | 1,127.65 | 43.79 | 1,243.91 | 42.66 | 1,243.91 | 42.66 |
| a | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 574.05 | 27.95 | 649.72 | 28.30 | 710.28 | 27.58 | 760.07 | 26.07 | 760.07 | 26.07 |
| b | Pertambangan dan Penggalian | 347.88 | 16.94 | 380.90 | 16.59 | 417.37 | 16.21 | 483.84 | 16.59 | 483.84 | 16.59 |
| II. | SEKTOR SEKUNDER | 397.92 | 19.38 | 450.02 | 19.60 | 522.09 | 20.27 | 609.17 | 20.89 | 609.17 | 20.89 |
| c | Industri Pengolahan | 88.15 | 4.29 | 97.33 | 4.24 | 115.69 | 4.49 | 133.76 | 4.59 | 133.76 | 4.59 |
| d | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.01 |
| e | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.44 | 0.27 | 6.18 | 0.27 | 7.38 | 0.29 | 7.66 | 0.26 | 7.66 | 0.26 |
| f | Konstruksi | 304.08 | 14.81 | 346.24 | 15.08 | 398.75 | 15.48 | 467.45 | 16.03 | 467.45 | 16.03 |
| III | SEKTOR TERSIER | 733.74 | 35.73 | 814.88 | 35.50 | 925.66 | 35.94 | 1,062.80 | 36.45 | 1,062.80 | 36.45 |
| g | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 275.95 | 13.44 | 308.91 | 13.46 | 351.33 | 13.64 | 403.58 | 13.84 | 403.58 | 13.84 |
| h | Transportasi dan Pergudangan | 31.93 | 1.55 | 35.39 | 1.54 | 38.57 | 1.50 | 43.48 | 1.49 | 43.48 | 1.49 |
| i | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.19 | 0.50 | 11.20 | 0.49 | 12.72 | 0.49 | 16.41 | 0.56 | 16.41 | 0.56 |
| j | Informasi dan Komunikasi | 21.81 | 1.06 | 24.47 | 1.07 | 24.57 | 0.95 | 26.29 | 0.90 | 26.29 | 0.90 |
| k | Jasa Keuangan dan Asuransi | 32.49 | 1.58 | 35.44 | 1.54 | 40.20 | 1.56 | 44.71 | 1.53 | 44.71 | 1.53 |
| l | Real Estat | 53.89 | 2.62 | 58.15 | 2.53 | 62.79 | 2.44 | 71.22 | 2.44 | 71.22 | 2.44 |
| m,n | Jasa Perusahaan | 1.05 | 0.05 | 1.16 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 1.55 | 0.05 | 1.55 | 0.05 |
| o | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 134.84 | 6.57 | 150.86 | 6.57 | 174.68 | 6.78 | 187.87 | 6.44 | 187.87 | 6.44 |
| p | Jasa Pendidikan | 104.96 | 5.11 | 116.66 | 5.08 | 135.16 | 5.25 | 157.47 | 5.40 | 157.47 | 5.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 32.22 | 1.57 | 34.98 | 1.52 | 41.04 | 1.59 | 49.38 | 1.69 | 49.38 | 1.69 |
| r,s,t,u | Jasa lainnya/Other Services Activities | 34.40 | 1.68 | 37.65 | 1.64 | 43.30 | 1.68 | 60.84 | 2.09 | 60.84 | 2.09 |
| Total PDRB Harga Berlaku | | 2,053.59 | 100.00 | 2,295.53 | 100.00 | 2,575.41 | 100.00 | 2915.88 | 100.00 | 2915.88 | 100.00 |
| B | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | | | | | | | | | | |
| I. | SEKTOR PRIMER | 837.73 | 44.33 | 893.33 | 43.85 | 945.92 | 43.05 | 973.86 | 41.14 | 973.86 | 41.14 |
| a | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 510.40 | 27.01 | 546.61 | 26.83 | 584.49 | 26.60 | 589.72 | 24.91 | 589.72 | 24.91 |
| b | Pertambangan dan Penggalian | 327.34 | 17.32 | 346.72 | 17.02 | 361.43 | 16.45 | 384.14 | 16.23 | 384.14 | 16.23 |
| II. | SEKTOR SEKUNDER | 368.50 | 19.50 | 401.00 | 19.68 | 441.05 | 20.07 | 493.17 | 20.84 | 493.17 | 20.84 |
| c | Industri Pengolahan | 83.96 | 4.44 | 90.19 | 4.43 | 101.77 | 4.63 | 116.46 | 4.92 | 116.46 | 4.92 |
| d | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.26 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 0.01 |
| e | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5.26 | 0.28 | 5.79 | 0.28 | 6.35 | 0.29 | 6.51 | 0.28 | 6.51 | 0.28 |
| f | Konstruksi | 279.03 | 14.77 | 304.73 | 14.96 | 332.61 | 15.14 | 369.86 | 15.63 | 369.86 | 15.63 |
| III | SEKTOR TERSIER | 683.46 | 36.17 | 742.93 | 36.47 | 810.15 | 36.87 | 899.94 | 38.02 | 899.94 | 38.02 |
| g | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 258.01 | 13.65 | 284.82 | 13.98 | 309.26 | 14.08 | 338.79 | 14.31 | 338.79 | 14.31 |
| h | Transportasi dan Pergudangan | 30.22 | 1.60 | 31.97 | 1.57 | 33.80 | 1.54 | 36.52 | 1.54 | 36.52 | 1.54 |
| i | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.30 | 0.49 | 9.96 | 0.49 | 11.01 | 0.50 | 13.71 | 0.58 | 13.71 | 0.58 |
| j | Informasi dan Komunikasi | 22.33 | 1.18 | 25.07 | 1.23 | 25.66 | 1.17 | 27.55 | 1.16 | 27.55 | 1.16 |
| k | Jasa Keuangan dan Asuransi | 28.70 | 1.52 | 30.43 | 1.49 | 33.46 | 1.52 | 36.15 | 1.53 | 36.15 | 1.53 |
| l | Real Estat | 50.52 | 2.67 | 52.87 | 2.60 | 56.27 | 2.56 | 60.38 | 2.55 | 60.38 | 2.55 |
| m,n | Jasa Perusahaan | 0.98 | 0.05 | 1.07 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 1.32 | 0.06 | 1.32 | 0.06 |
| o | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 122.55 | 6.49 | 131.17 | 6.44 | 142.95 | 6.51 | 154.30 | 6.52 | 154.30 | 6.52 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| p | Jasa Pendidikan | 98.71 | 5.22 | 108.72 | 5.34 | 120.83 | 5.50 | 135.23 | 5.71 | 135.23 | 5.71 |
| q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 29.45 | 1.56 | 31.62 | 1.55 | 36.15 | 1.65 | 41.60 | 1.76 | 41.60 | 1.76 |
| r,s,t,u | Jasa lainnya/Other Services Activities | 32.70 | 1.73 | 35.24 | 1.73 | 39.59 | 1.80 | 54.40 | 2.30 | 54.40 | 2.30 |
| Total PDRB Harga Konstan | | 1,889.70 | 100.00 | 2,037.26 | 100.00 | 2,197.12 | 100.00 | 2,366.96 | 100.00 | 2,366.96 | 100.00 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi Dalam Angka Tahun 2015 – 2016

Keterangan : * Angka sementara dan **Angka sangat sementara

2. Organisasi Perangkat Daerah

❖ Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016:

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat Daerah.

Dinas 21:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Unit Kerja UPTD Diknas dan SKB (8 UPTD dan 1 SKB), Pelayanan Pendidikan Kecamatan, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c) Dinas Pariwisata;
- d) Dinas Kesehatan Unit kerja UPTD Dinkes (8 Puskesmas)
- e) Dinas Sosial
- f) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- k) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- l) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- m) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- n) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- o) Dinas Perhubungan
- p) Dinas Lingkungan Hidup

- q) Dinas Pertanian
- r) Dinas Ketahanan Pangan
- s) Dinas Kelautan dan Perikanan Unit kerja UPTD Perikanan (3 UPTD)
- t) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- u) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Badan 6:

- a) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- c) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- d) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor 2 :

- a) Sekretariat KORPRI
- b) Rumah Sakit Umum Daerah

Kecamatan 8:

- a) Sekretariat Kecamatan Wangi-Wangi
- b) Sekretariat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- c) Sekretariat Kecamatan Kaledupa
- d) Sekretariat Kecamatan Kaledupa Selatan
- e) Sekretariat Kecamatan Tomia
- f) Sekretariat Kecamatan Tomia Timur
- g) Sekretariat Kecamatan Binongko
- h) Sekretariat Kecamatan Togo Binongko

Kelurahan 25:

- a) Kelurahan Pongo
- b) Kelurahan Wanci
- c) Kelurahan Wandoka
- d) Kelurahan Wandoka Utara
- e) Kelurahan Wandoka Selatan
- f) Kelurahan Waha
- g) Kelurahan Waetuno
- h) Kelurahan Mandati I
- i) Kelurahan Mandati II

- j) Kelurahan Mandati III
- k) Kelurahan Buranga
- l) Kelurahan Ambeua
- m) Kelurahan Lagiwae
- n) Kelurahan Laulua
- o) Kelurahan Onemay
- p) Kelurahan Tongano Barat
- q) Kelurahan Tongano Timur
- r) Kelurahan Bahari
- s) Kelurahan Patipelong
- t) Kelurahan Palahidu
- u) Kelurahan Taipabu
- v) Kelurahan Wali
- w) Kelurahan Rukuwa
- x) Kelurahan Sowa
- y) Kelurahan Popalia

G. PNS Perangkat Daerah

- ❖ Jumlah pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut:

Tabel 6 : Jumlah dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tahun 2012–2016

| No. | Uraian | Jumlah dan Proporsi | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) |
| 1 | SD Sederajat | 9 | 0.27 | 10 | 0.3 | 5 | 0.15 | 6 | 0.17 | 4 | 0,13 |
| 2 | SMP Sederajat | 11 | 0.33 | 8 | 0.24 | 6 | 0.18 | 38 | 1.07 | 34 | 1,08 |
| 3 | SMA Sederajat | 586 | 17.63 | 585 | 17.76 | 497 | 15.30 | 682 | 19.17 | 620 | 19,78 |
| 4 | D-I | 61 | 1.84 | 60 | 1.82 | 58 | 1.79 | 55 | 1.55 | 36 | 1,15 |
| 5 | D-II | 723 | 21.75 | 702 | 21.32 | 537 | 16.53 | 512 | 14.39 | 355 | 11,33 |
| 6 | D-III | 459 | 13.81 | 434 | 13.18 | 413 | 12.71 | 413 | 11.61 | 402 | 12,83 |
| 7 | S1 | 1.413 | 42.51 | 1.429 | 43.4 | 1.654 | 50.91 | 1,770 | 49.75 | 1.584 | 50,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 8 | S2 | 61 | 1.84 | 64 | 1.94 | 78 | 2.40 | 80 | 2.25 | 98 | 3,13 |
| 9 | S3 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | 1 | 0,03 |
| Jumlah | | 3,324 | 100 | 3,293 | 100 | 3,249 | 100 | 3,558 | 100 | 3.134 | 100 |

| No | Uraian | Jumlah dan Proporsi | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) |
| B | Pangkat dan Golongan | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | - | - | - | - | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | - | - |
| 2 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 16 | 0.48 | 13 | 0.39 | 15 | 0.46 | 15 | 0.42 | 20 | 0,03 |
| 3 | Pembina TK.I (IV/b) | 55 | 1.65 | 55 | 1.67 | 62 | 1.91 | 61 | 1.71 | 162 | 0,26 |
| 4 | Pembina (IV/a) | 555 | 16.7 | 540 | 16.4 | 584 | 17.97 | 622 | 17.48 | 448 | 0,71 |
| Sub jumlah | | 626 | 18.83 | 608 | 18.46 | 622 | 20.38 | 699 | 19.65 | 630 | 100 |
| 5 | Penata TK.I (III/d) | 334 | 10.05 | 370 | 11.24 | 423 | 13.02 | 389 | 10.93 | 383 | 0,21 |
| 6 | Penata (III/c) | 367 | 11.04 | 417 | 12.66 | 432 | 13.30 | 424 | 11.92 | 403 | 0,22 |
| 7 | Penata Muda TK.I (III/b) | 375 | 11.28 | 455 | 13.82 | 483 | 14.87 | 507 | 14.25 | 466 | 0,26 |

| No | Uraian | Jumlah dan Proporsi | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) | (Org) | (%) |
| 8 | Penata Muda (III/a) | 580 | 17.45 | 462 | 14.03 | 488 | 15.02 | 635 | 17.85 | 554 | 0,31 |
| Sub jumlah | | 1.656 | 49.82 | 1.704 | 51.75 | 1,826 | 56.20 | 1,955 | 54.95 | 1.806 | 100 |
| 9 | Pengatur TK.I (II/d) | 207 | 6.23 | 261 | 7.93 | 288 | 8.86 | 214 | 6.01 | 165 | 0,25 |
| 10 | Pengatur (II/c) | 418 | 12.58 | 396 | 12.03 | 297 | 9.14 | 284 | 7.98 | 166 | 0,25 |
| 11 | Pengatur Muda TK.I (II/b) | 323 | 9.72 | 220 | 6.68 | 121 | 3.72 | 107 | 3.01 | 76 | 0,11 |
| 12 | Pengatur Muda (II/a) | 86 | 2.59 | 100 | 3.04 | 54 | 1.66 | 263 | 7.39 | 254 | 0,38 |
| Sub jumlah | | 1,034 | 31.11 | 977 | 29.67 | 760 | 23,39 | 868 | 24.40 | 661 | 100 |
| 13 | Juru TK.I (I/d) | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 | - | - | 0 | 0.00 | - | - |
| 14 | Juru (I/c) | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | - | - | 34 | 0.96 | 34 | 0,92 |
| 15 | Juru Muda TK.I (I/b) | 2 | 0.06 | - | - | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 0,03 |
| 16 | Juru Muda (I/a) | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 | - | - | 1 | 0.03 | 2 | 0,05 |
| Sub jumlah | | 8 | 0.24 | 4 | 0.12 | 1 | 0.03 | 36 | 1.01 | 37 | 100 |
| Jumlah | | 3,324 | 100 | 3,293 | 100 | 3,249 | 100 | 3,558 | 100 | 3.134 | 100 |

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Wakatobi, kondisi per 31 Desember 2016.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi berdasarkan tingkat pendidikan selama lima tahun terakhir khususnya untuk pendidikan Sarjana (S1) meningkat dari 1.413 personil pada tahun 2012 menjadi 1.584 personil pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 12,10%. Demikian halnya komposisi PNS

kabupaten Wakatobi menurut pangkat dan golongan, pada tahun 2012 yaitu penata golongan III berjumlah 1.656 personil meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.806 pesonil atau mengalami peningkatan sebesar 9,06%. Sedangkan Golongan IV pada tahun 2012 berjumlah 626 personil meningkat menjadi 630 personil pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 0,64%.

H. Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 7 : laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pencapaian kinerja tahun 2016

| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) |
|--------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | PENDAPATAN | 746.997.011.253 | 745.334.343.944 | 100% |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 25.123.835.222 | 25.028.716.073 | 100% |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 5.353.400.365 | 5.880.355.181 | 91% |
| 1.1.2 | Pajak Hotel | 692.745.485 | 657.579.478 | 95% |
| 1.1.3 | Pajak Restoran | 1.378.414.894 | 1.101.568.124 | 80% |
| 1.1.4 | Pajak Hiburan | 974.400 | 750.000 | 77% |
| 1.1.5 | Pajak Reklame | 62.741.029 | 91.594.774 | 68% |
| 1.1.6 | Pajak Penerangan Jalan | 1.622.843.537 | 1.738.231.955 | 93% |
| 1.1.7 | Pajak Air Bawah Tanah | 1.455.500 | 2.280.000 | 64% |
| 1.1.8 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 587.903.762 | 518.811.633 | 88% |
| 1.1.9 | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 167.206.500 | 207.083.811 | 81% |
| 1.1.10 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 839.115.258 | 1.562.455.406 | 54% |
| 1.1.11 | Hasil Retribusi Daerah | 1.698.956.000 | 966.380.565 | 57% |
| 1.1.12 | Retribusi Jasa Umum | 415.356.000 | 459.059.500 | 90% |
| 1.1.13 | Retribusi Jasa Usaha | 867.200.000 | 232.551.000 | 27% |
| 1.1.14 | Retribusi Perizinan Tertentu | 416.400.000 | 274.770.065 | 66% |
| 1.1.15 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.374.566.110 | 7.374.566.110 | 100% |
| 1.1.16 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD | 7.374.566.110 | 7.374.566.110 | 100% |
| 1.1.17 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 10.696.912.747 | 10.807.414.217 | 99% |
| 1.1.1 | Penerimaan Jasa Giro | 2.595.065.637 | 3.029.193.294 | 86% |
| 1.1.2 | Penerimaan Bunga Deposito | 0 | 376.027.396 | 0% |
| 1.1.3 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 513.842.562 | 507.227.721 | 99% |
| 1.1.4 | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0 | 527.927.198 | 0,0% |
| 1.1.5 | Pendapatan Denda Pajak | 0 | 30.654.703 | 0,0% |
| 1.1.6 | Pendapatan Denda Retribusi | 0 | 2.189.340 | 0,0% |
| 1.1.7 | Pendapatan Dari Pengembalian | 34.373.368 | 106.554.168 | 32% |
| 1.1.8 | Pendapatan BLUD | 3.988.657.995 | 3.073.588.936 | 77% |
| 1.1.9 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 393.049.185 | 172.697.961 | 44% |

| | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|------|
| 1.1.10 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 2.871.924.000 | 2.757.493.500 | 96% |
| 1.1.11 | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP | 300.000.000 | 223.860.000 | 75% |
| 2.1 | DANA PERIMBANGAN | 661.240.554.046 | 655.542.811.799 | 99% |
| 2.1.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 14.208.400.646 | 15.347.599.832 | 93% |
| 2.1.2 | Bagi Hasil Pajak | 9.934.758.646 | 11.435.511.141 | 87% |
| 2.1.3 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 4.273.642.000 | 3.912.088.691 | 92% |
| 2.1.4 | Dana Alokasi Umum | 448.607.750.000 | 448.607.750.000 | 100% |
| 2.1.5 | Dana Alokasi Khusus | 198.424.403.400 | 191.587.461.967 | 97% |
| 2.1.6 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 198.424.403.400 | 191.587.461.967 | 97% |
| 3.1 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 60.632.621.985 | 64.762.816.072 | 94% |
| 3.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 6.372.978.985 | 11.041.541.336 | 58% |
| 3.1.2 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 6.372.978.985 | 11.041.541.336 | 58% |
| 3.1.2 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 52.639.643.000 | 52.074.003.000 | 99% |
| 3.1.3 | Dana Penyesuaian | 52.639.643.000 | 52.074.003.000 | 99% |
| 3.1.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 1.620.000.000 | 1.605.000.000 | 99% |
| 3.1.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 1.620.000.000 | 1.605.000.000 | 99% |
| 3.1.6 | Pendapatan Lainnya | 0 | 42.271.736 | 0,0% |
| 2 | BELANJA | 797.094.033.724 | 746.959.561.810 | 94% |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 369.853.632.024 | 356.125.446.785 | 96% |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 260.799.543.352 | 251.368.193.043 | 96% |
| 2.1.2 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 204.163.536.061 | 202.219.961.319 | 99% |
| 2.1.3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 54.676.149.491 | 47.613.231.724 | 87% |
| 2.1.4 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 1.610.000.000 | 1.535.000.000 | 95% |
| 2.1.5 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 267.670.000 | 0 | 0,0% |
| 2.1.6 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 82.187.800 | 0 | 0,0% |
| 2.1.7 | Belanja Subsidi | 656.000.000 | 0 | 0,0% |
| 2.1.8 | Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga | 656.000.000 | 0 | 0,0% |
| 2.1.9 | Belanja Hibah | 9.490.051.465 | 8.879.023.054 | 94% |
| 2.1.10 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 779.927.000 | 779.927.000 | 100% |
| 2.1.11 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 7.030.124.465 | 6.419.096.054 | 91% |
| 2.1.12 | BOP PAUD Masyarakat/Swasta | 1.680.000.000 | 1.680.000.000 | 100% |
| 2.1.13 | Belanja Bantuan Sosial | 1.557.103.200 | 1.073.532.000 | 69% |
| 2.1.14 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 1.557.103.200 | 1.073.532.000 | 69% |
| 2.1.15 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 705.235.600 | 0 | 0,0% |

| | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------|
| 2.1.16 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 535.340.000 | 0 | 0,0% |
| 2.1.17 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa | 169.895.600 | 0 | 0,0% |
| 2.1.18 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 95.507.348.680 | 94.796.249.688 | 99% |
| 2.1.19 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | 1.237.500.000 | 1.110.000.000 | 90% |
| 2.1.20 | Belanja Bantuan Kepada Partai Politik | 405.808.980 | 387.852.988 | 96% |
| 2.1.21 | Belanja Transfer Alokasi Dana Desa | 93.864.039.700 | 93.298.396.700 | 99% |
| 2.1.22 | Belanja Tidak Terduga | 1.138.349.727 | 8.449.000 | 0,74% |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 427.240.401.700 | 390.834.115.025 | 91% |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 25.565.579.400 | 23.988.675.314 | 94% |
| 2.2.2 | Honorarium PNS | 6.853.925.000 | 6.376.245.850 | 93% |
| 2.2.3 | Honorarium Non PNS | 17.115.662.000 | 16.419.729.714 | 96% |
| 2.2.4 | Uang Lembur | 1.595.992.400 | 1.192.699.750 | 75% |
| 2.2.5 | Belanja Barang dan Jasa | 154.514.474.838 | 139.027.823.581 | 90% |
| 2.2.6 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.906.968.325 | 8.474.397.391 | 95% |
| 2.2.7 | Belanja Bahan/Material | 7.199.531.900 | 5.282.548.042 | 73% |
| 2.2.8 | Belanja Jasa Kantor | 14.465.753.923 | 13.179.746.796 | 91% |
| 2.2.9 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.677.564.892 | 4.362.982.902 | 93% |
| 2.2.10 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.506.324.950 | 3.089.671.328 | 88% |
| 2.2.11 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 844.500.000 | 816.500.000 | 97% |
| 2.2.12 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 588.465.000 | 479.831.000 | 82% |
| 2.2.13 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.091.760.000 | 995.146.000 | 91% |
| 2.2.14 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.663.541.094 | 9.771.969.991 | 92% |
| 2.2.15 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 451.326.959 | 438.550.000 | 97% |
| 2.2.16 | Belanja Pakaian Kerja | 94.200.000 | 94.196.000 | 100% |
| 2.2.17 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 679.295.000 | 636.313.500 | 94% |
| 2.2.18 | Belanja Perjalanan Dinas | 46.534.142.653 | 44.303.572.984 | 95% |
| 2.2.19 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 442.900.000 | 440.855.500 | 100% |
| 2.2.20 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 3.865.285.530 | 3.378.742.842 | 87% |
| 2.2.21 | Belanja Pemeliharaan | 4.519.594.600 | 4.329.476.633 | 96% |
| 2.2.22 | Belanja Jasa Konsultansi | 6.362.110.000 | 3.916.573.000 | 62% |
| 2.2.23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.597.937.517 | 16.472.845.850 | 99% |
| 2.2.24 | Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 160.000.000 | 160.000.000 | 100% |
| 2.2.25 | Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi/Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional | 3.697.871.400 | 2.770.737.500 | 75% |

| | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|------|
| 2.2.26 | Belanja Beasiswa Pendidikan untuk Masyarakat | 1.900.448.800 | 1.444.798.800 | 76% |
| 2.2.27 | Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 585.250.000 | 573.900.000 | 98% |
| 2.2.28 | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli | 3.870.495.000 | 2.816.010.000 | 73% |
| 2.2.29 | Belanja Jaminan Kesehatan/Kecelakaan dan Kematian | 3.526.709.300 | 3.200.272.523 | 91% |
| 2.2.30 | Belanja Jasa Wasit/Juri/Tim Penilai | 19.400.000 | 18.650.000 | 96% |
| 2.2.31 | Belanja yang Bersumber dari Dana BOK | 5.180.000.000 | 4.968.487.900 | 96% |
| 2.2.32 | Belanja BLUD | 3.988.657.995 | 2.611.047.099 | 65% |
| 2.2.33 | Belanja yang Bersumber dari Dana Bantuan Operasional KB | 94.440.000 | 0 | 0% |
| 2.2.34 | Belanja Modal | 247.160.347.462 | 227.817.616.130 | 92% |
| 2.2.35 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 4.428.083.808 | 3.717.979.099 | 84% |
| 2.2.36 | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 1.326.500.000 | 1.324.597.600 | 100% |
| 2.2.37 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 3.695.226.000 | 3.346.446.000 | 91% |
| 2.2.38 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 8.000.000 | 7.941.800 | 99% |
| 2.2.39 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 5.865.789.000 | 3.763.716.100 | 64% |
| 2.2.40 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor | 3.495.042.000 | 3.472.513.000 | 99% |
| 2.2.41 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 60.000.000 | 0 | 0,0% |
| 2.2.42 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur | 214.024.500 | 208.930.500 | 98% |
| 2.2.43 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 6.259.392.500 | 2.580.771.650 | 41% |
| 2.2.44 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 1.890.575.000 | 1.776.826.600 | 94% |
| 2.2.45 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 1.252.040.600 | 1.216.952.600 | 97% |
| 2.2.46 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 1.050.568.500 | 1.044.940.800 | 99% |
| 2.2.47 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 676.544.000 | 672.214.000 | 99% |
| 2.2.48 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 32.497.000 | 32.495.000 | 100% |
| 2.2.49 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 11.691.832.000 | 10.660.915.390 | 91% |
| 2.2.50 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 650.648.200 | 649.168.000 | 100% |

| | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|------|
| 2.2.51 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 17.500.000 | 17.500.000 | 100% |
| 2.2.52 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 59.727.220.584 | 55.153.912.370 | 92% |
| 2.2.53 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 200.000.000 | 199.000.000 | 100% |
| 2.2.54 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 417.000.000 | 415.250.000 | 100% |
| 2.2.55 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 2.336.200.000 | 2.336.135.400 | 100% |
| 2.2.56 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya | 150.000.000 | 149.850.000 | 100% |
| 2.2.57 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 430.000.000 | 399.999.700 | 93% |
| 2.2.58 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 200.000.000 | 189.280.000 | 95% |
| 2.2.59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 53.583.788.861 | 50.099.400.546 | 93% |
| 2.2.60 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 39.019.655.331 | 38.389.113.525 | 98% |
| 2.2.61 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut | 200.000.000 | 197.690.000 | 99% |
| 2.2.62 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 619.640.000 | 598.475.000 | 97% |
| 2.2.63 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air | 5.520.520.000 | 5.460.560.600 | 99% |
| 2.2.64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 13.000.000 | 8.000.000 | 62% |
| 2.2.65 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 1.912.232.150 | 1.304.960.000 | 68% |
| 2.2.66 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik | 150.000.000 | 149.293.350 | 100% |
| 2.2.67 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan | 210.000.000 | 197.427.500 | 94% |
| 2.2.68 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum | 38.379.237.428 | 36.779.130.050 | 96% |
| 2.2.69 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 526.950.000 | 457.503.600 | 87% |
| 2.2.70 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas | 309.600.000 | 303.566.350 | 98% |
| 2.2.71 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 105.040.000 | 5.000.000 | 5% |
| 2.2.72 | Belanja Modal Aset Tetap | 315.000.000 | 310.790.000 | 99% |

| | | | | |
|--------|---|----------------|----------------|------|
| | Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | | | |
| 2.2.73 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 221.000.000 | 219.370.000 | 99% |
| 2.3 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 59.710.152.668 | 59.229.458.172 | 99% |
| 2.3.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 59.228.458.172 | 59.228.458.172 | 100% |
| 2.3.2 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 59.228.458.172 | 59.228.458.172 | 100% |
| 2.3.3 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 481.694.496 | 1.000.000 | 0,2% |
| 2.4 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 9.613.130.197 | 9.029.123.341 | 94% |
| 2.4.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.100.000.000 | 6.098.162.900 | 100% |
| 2.4.2 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 6.100.000.000 | 6.098.162.900 | 100% |
| 2.4.3 | Pembayaran Pokok Utang | 3.513.130.197 | 2.930.960.441 | 83% |
| 2.4.4 | Pembayaran Penyelesaian Kewajiban Daerah Kepada Pihak Ketiga | 3.513.130.197 | 2.930.960.441 | 83% |
| 2.5 | PEMBIAYAAN NETTO | 50.097.022.471 | 50.200.334.831 | 100% |
| 2.5.1 | SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 0 | 48.575.116.965 | 0,0% |

Badan pengelola keuangan dan aset daerah tahun 2016.

I. Pelayanan Publik

1. Pelayanan Pendidikan

Kemajuan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik jumlah sekolah, jumlah murid dan tenaga pendidik/guru pada setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut.

a) Jumlah Sekolah

Jumlah sekolah di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir, yakni : PAUD meningkat sebesar 19,51 %. yakni dari 82 sekolah pada tahun 2012 menjadi 98 sekolah pada tahun 2016, SD sederajat meningkat sebesar 0,85%, yakni dari 117 sekolah pada tahun 2012 menjadi 118 sekolah pada tahun 2016, SLTP sederajat (SMP/MTs) meningkat sebesar 8,00%, yakni dari 50 sekolah pada tahun 2012 menjadi 54 sekolah pada tahun 2016 dan SLTA (SMA/SMK/MAN) meningkat sebesar 20,83%, yakni dari 24 sekolah pada tahun 2012 menjadi 29 sekolah pada tahun 2016.

b) Jumlah Guru

Jumlah guru PNS dan P3K pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2012 berjumlah 2.912 mengalami pengurangan menjadi 2.038 pada tahun 2016 atau menurun sebesar 30,01% .untuk melihat lebih jelas penurunan guru PNS Non PNS pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN di Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini :

Tabel 8 : Jumlah Guru PNS dan P3K berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012- 2016.

| No | Jumlah Guru | Guru PAUD | | | | |
|----|-------------|----------------------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | PNS | 132 | 127 | 120 | 118 | 117 |
| 2 | P3K | 224 | 199 | 206 | 21 | 14 |
| | Jumlah | 356 | 326 | 326 | 139 | 131 |
| No | Jumlah Guru | Guru SD / MIN | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | PNS | 770 | 853 | 874 | 861 | 825 |
| 2 | P3K | 452 | 389 | 305 | 113 | 114 |
| | Jumlah | 1222 | 1242 | 1179 | 974 | 939 |
| No | Jumlah Guru | Guru SMP / MTs | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | PNS | 391 | 375 | 388 | 329 | 331 |
| 2 | P3K | 345 | 329 | 220 | 137 | 196 |
| | Jumlah | 736 | 704 | 608 | 466 | 527 |
| No | Jumlah Guru | Guru SMA / SMK / MAN | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | PNS | 280 | 295 | 302 | 269 | 293 |
| 2 | P3K | 318 | 354 | 346 | 91 | 148 |
| | Jumlah | 598 | 649 | 648 | 360 | 441 |

Sumber : Dinas Pendidika, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, 2012 – 2016

c) Jumlah Siswa

Jumlah siswa berdasarkan angka partisipasi murni SD,SMP dan SMA pada tahun 2016 di Kabupaten Wakatobi dibanding tahun sebelumnya, SD pada tahun 2012 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2016 sebesar 18,69% sedangkan SMP/MTs mengalami pasang surut pada tahun 2012 sampai tahun 2016 mencapai angka persentase 39,92%. Angka partisipasi murni SMA/SMK/MAN selama lima

tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai angka 31,6%.

d) Jumlah Ruang Kelas Belajar Sekolah

Jumlah ruang belajar PAUD, SD, SMP dan SMA pada tahun 2012 di Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu: ruang belajar PAUD sederajat tahun 2012 129 meningkat menjadi 144 atau mengalami peningkatan sebesar 11,36%; Ruang belajar SD sederajat tahun 2012 726 meningkat menjadi 749 atau mengalami peningkatan sebesar 3,19%; Ruang belajar SMP sederajat tahun 2012 284 meningkat menjadi 311 atau mengalami peningkatan sebesar 9,51%; Ruang belajar SMA sederajat tahun 2012 188 meningkat menjadi 236 atau mengalami peningkatan sebesar 25,53%.

2. Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Wakatobi dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka pemerintah Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara menyeluruh di setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Wakatobi sampai tahun 2016, terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 20 unit Puskesmas, 14 unit Pustu, 12 unit Polindes, 70 Poskesdes dan 1 Puskesmas keliling.

Tabel 9: Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2016

| No. | Kecamatan | RSUD | Puskesmas | Pustu | Polindes | Poskesdes | Pusk. Keliling | Jum (unit) | Prosentase (%) |
|-----|-----------------------|------|-----------|-------|----------|-----------|----------------|------------|----------------|
| 1 | Wangi - Wangi | - | 2 | 3 | 2 | 14 | - | 21 | 18,10 |
| 2 | Wangi - Wangi Selatan | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | - | 23 | 19,83 |
| 3 | Kaledupa | - | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 16 | 13,79 |
| 4 | Kaledupa Selatan | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 12 | 10,34 |
| 5 | Tomia | - | 3 | 2 | - | 7 | - | 12 | 10,34 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|----|----|----|----|---|-----|--------|
| 6 | Tomia Timur | - | 2 | 3 | 1 | 9 | - | 15 | 12,93 |
| 7 | Binongko | - | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 10 | 8,62 |
| 8 | Togo Binongko | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 6,90 |
| Jumlah | | 1 | 20 | 14 | 12 | 70 | 1 | 116 | 100,00 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, 2016

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah penyediaan data base kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, dan meningkatkan pemanfaatan NIK. Indikator lain administrasi kependudukan adalah adanya data base kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu/pilkada serentak. Capaian kinerja kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2011-2015 bisa dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 : Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Tahun | Jml KK | Jumlah Penduduk | | | Jml Wajib KTP | Jml Pddk Memiliki KTP | Jml yg Belum Memiliki KTP | Jml Pddk yg Memiliki AKTE |
|-----|-------|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | L | P | Jml | | | | |
| 1. | 2011 | 14.790 | 45.529 | 49.317 | 94.846 | 57.428 | 52.826 | 4.602 | 19.793 |
| 2. | 2012 | 14.790 | 45.580 | 49.373 | 94.953 | 58.122 | 52.926 | 5.196 | 19.793 |
| 3. | 2013 | 33.963 | 45.678 | 49.979 | 95.157 | 62.235 | 57.455 | 4.780 | 36.942 |
| 4. | 2014 | 34.599 | 45.515 | 49.277 | 94.789 | 72.537 | 60.969 | 11.568 | 57.862 |
| 5. | 2015 | 36.549 | 45.612 | 49.373 | 94.983 | 74.833 | 62.198 | 12.635 | 60.361 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi 2016

Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah wajib KTP di Kabupaten Wakatobi tahun 2015 mencapai 75,63 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut penduduk yang sudah memiliki KTP mencapai 83,12 persen. Ini berarti masih ada penduduk yang belum memiliki KTP sejumlah 16,88 persen. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi yang sudah memiliki AKTA kelahiran baru mencapai 54,78 persen.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Fokus perubahan yang menjadi prioritas pembinaan terhadap permasalahan manajemen pemerintahan daerah dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelayanan publik

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain

- 1) Peningkatan unit pelayanan publik yang memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan (SP).
- 2) Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik.

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal secara berkala bidang pemerintahan dan pembinaan aparatur.
- 2) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- 3) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

c. Sumber daya manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain

- 1) Pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik.
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan.
- 3) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan.
- 4) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Reformasi Birokrasi, selain melakukan berbagai upaya pembaharuan sistem dan perubahan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik, juga melaksanakan pemeliharaan hal-hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang sudah baik meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan baik
Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri memperoleh, Peringkat 1 LPPD Tahun 2016 kategori sangat baik Kabupaten Wakatobi;

- b. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan baik Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pada WTP tiga tahun pertama masih dengan “paragraf”, sedangkan pada WTP Tahun 2016 sudah tidak terdapat “paragraf”.
- c. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan hasilnya baik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 memperoleh nilai CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

B. SASARAN

Sasaran reformasi birokrasi dijabarkan dalam prioritas manajemen pemerintahan daerah, prioritas yang harus dipelihara, dan prioritas peningkatan pelayanan publik.

1. Prioritas Manajemen Pemerintahan Daerah

a) Manajemen Perubahan

| Sasaran | Indikator | Target | | | | |
|---------------------------|---|--------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Tim Reformasi Birokrasi | a Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk | √ | | | | |
| | b Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi | | √ | | | |
| | c Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah | | √ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | ditindaklanjuti | | | | | |
| 2 | Road Map Reformasi Birokrasi | a | Road Map telah disusun dan diformalkan | √ | | | | |
| | | b | Road Map telah mencakup 8 area perubahan | | √ | | | |
| | | c | Road Map telah mencakup "quick wins" | √ | | | | |
| | | d | Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi | √ | | | | |
| | | e | Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi | | √ | | | |
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi | a | PMPRB telah di rencanakan dan di organisasikan dengan baik | √ | | | | |
| | | b | Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja | √ | | | | |
| | | c | Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB | | √ | | | |
| | | d | Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | √ | | | |
| | | e | Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi | | √ | | | |
| | | f | Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi | | √ | | | |
| | | g | Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan | | √ | | | |
| 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kinerja | a | Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara | √ | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | |
| | | b | Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilakukan | √ | | | | |
| | | c | Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model | | √ | | | |

b) Penataan Peraturan Perundang-undangan

| Sasaran | | Indikator | Target | | | | | |
|---------|---|-----------|---|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Harmonisasi | a | Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron | √ | | | | |
| | | b | Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron | √ | | | | |
| 2 | Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang dangan | a | Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/ policy paper, dan Paraf Koordinasi | √ | | | | |
| | | b | Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan | | √ | | | |

c) Penataan Tata Laksana

| Sasaran | | Indikator | | Target | | | | |
|---------|---|-----------|--|--------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama | a | Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | | √ | | | |
| | | b | Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) | | √ | | | |
| | | c | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | √ | | | | |
| | | d | Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi | | √ | | | |
| 2 | E-Government | a | Memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi | √ | | | | |
| | | b | Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll) | √ | | | | |
| | | c | Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) | | √ | | | |
| | | d | Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat | | √ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran,dll) | | | | | |
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | a | Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian) | √ | | | | |
| | | b | Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik | √ | | | | |
| | | c | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | | √ | | | |

d) Sumberdaya Aparatur

| | Sasaran | Indikator | Target | | | | | |
|---|--|-----------|--|------|------|------|------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | a | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan | √ | | | | |
| | | b | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan | √ | | | | |
| | | c | Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan | | √ | | | |
| | | d | Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan | | √ | | | |
| | | e | Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung | | √ | | | |
| 2 | Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan | a | Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) | √ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | bebas KKN | | | | | | | |
| | | b | Persyaratan jelas, tidak Diskriminatif | √ | | | | |
| | | c | Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN | √ | | | | |
| | | d | Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka | √ | | | | |
| 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | a | Telah ada standar kompetensi jabatan | √ | | | | |
| | | b | Telah dilakukan assessment pegawai | √ | | | | |
| | | c | Telah diidentifikasi Kebutuhan pengembangan Kompetensi | | √ | | | |
| | | d | Telah disusun rencana Pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi | | √ | | | |
| | | e | Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi | | √ | | | |
| | | f | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala | | √ | | | |
| 4 | Promosi jabatan dilakukan secara terbuka | a | Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan | √ | | | | |
| | | b | Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan | √ | | | | |
| | | c | Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif | √ | | | | |
| | | d | Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen | √ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | e | Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka | √ | | | | |
| 5 | Penetapan kinerja individu | a | Terdapat penerapan penetapan kinerja individu | √ | | | | |
| | | b | Terdapat sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | √ | | | | |
| | | c | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya | √ | | | | |
| | | d | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | √ | | | | |
| | | e | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu | √ | | | | |
| | | f | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu | | √ | | | |
| | | g | Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja | | | √ | | |
| 6 | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | a | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan | √ | | | | |
| | | b | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan | | √ | | | |
| | | c | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi | | √ | | | |
| | | d | Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) | | √ | | | |
| 7 | Pelaksanaan evaluasi jabatan | a | Informasi faktor jabatan telah disusun | √ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | b | Peta jabatan telah ditetapkan | √ | | | | |
| | | c | Kelas jabatan telah Ditetapkan | √ | | | | |
| 8 | Sistem Informasi Kepegawaian | a | Sistem informasi kepegawaian telah di bangun sesuai kebutuhan | √ | | | | |
| | | b | Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | | √ | | | |
| | | c | Sistem informasi kepegawaian terus di mutakhirkan | | √ | | | |
| | | d | Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM | | √ | | | |

e) Penguatan Pengawasan

| Sasaran | Indikator | Target | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|------|------|------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | Gratifikasi | a | Terdapat kebijakan penanganan gratifikasi | √ | | | | |
| | | b | Telah dilakukan public Campaign | | √ | | | |
| | | c | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan | | √ | | | |
| | | d | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | | | √ | | |
| | | e | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | | | √ | | |
| 2 | Penerapan SPIP | a | Terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP | √ | | | | |
| | | b | Lingkungan pengendalian telah dibangun | √ | | | | |
| | | c | Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi | | √ | | | |
| | | d | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | | √ | | | |
| | | e | SPI telah diinformasikan dan | | √ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | | | | | |
| | | f | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern | | √ | | | |
| 3 | Pengaduan Masyarakat | a | Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat | | √ | | | |
| | | b | Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | | √ | | | |
| | | c | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | | √ | | | |
| 4 | Whistle-Blowing System | a | Telah terdapat Whistle Blowing System | √ | | | | |
| | | b | Whistle Blowing System telah disosialisasikan | | √ | | | |
| | | c | Whistle Blowing System telah diimplementasikan | | √ | | | |
| | | d | Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System | | √ | | | |
| | | e | Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah Ditindaklanjuti | | √ | | | |
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | a | Telah terdapat penanganan benturan kepentingan | √ | | | | |
| | | b | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan | | √ | | | |
| | | c | Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan | | √ | | | |
| | | d | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | | √ | | | |
| | | e | Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti | | √ | | | |
| 6 | Pembangunan Zona Integritas | a | Telah dilakukan penancangan zona integritas | √ | | | | |
| | | b | Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas | √ | | | | |
| | | c | Telah dilakukan pembangunan zona | | √ | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | Integritas | | | | | |
| | | d | Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan | √ | | | | |
| | | e | Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM" | √ | | | | |
| 7 | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | a | Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan | √ | | | | |
| | | b | APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas | √ | | | | |
| | | c | APIP didukung dengan anggaran yang memadai | | √ | | | |
| | | d | APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko | | √ | | | |

f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

| Sasaran | Indikator | Target | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--|------|------|------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | Standar Pelayanan | a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | √ | | | | |
| | | b | Standar Pelayanan telah Dimaklumkan | √ | | | | |
| | | c | Terdapat SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan | √ | | | | |
| | | d | Dilakukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan | | √ | | | |
| | | e | Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP | | √ | | | |
| 2 | Budaya Pelayanan Prima | a | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) | √ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | | √ | | | |
| | | c | Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | | | √ | | |
| | | d | Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi | | √ | | | |
| | | e | Terdapat inovasi Pelayanan | √ | | | | |
| 3 | Pengelolaan Pengaduan | a | Terdapat media pengaduan pelayanan | √ | | | | |
| | | b | Terdapat SOP pengaduan Pelayanan | √ | | | | |
| | | c | Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan | | √ | | | |
| | | d | Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan | | √ | | | |
| | | e | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan | | √ | | | |
| 4 | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | a | Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | √ | | | | |
| | | b | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | | √ | | | |
| | | c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | | √ | | | |
| 5 | Pemanfaatan Teknologi Informasi | a | Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan | √ | | | | |
| | | b | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | | √ | | | |
| | | c | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | | √ | | | |

g) Hasil yang Diharapkan

| Sasaran | Indikator | Target | | | | | |
|--|-----------|--|------|------|------|------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | a | Nilai akuntabilitas kinerja | | | | | |
| | b | Nilai kapasitas organisasi (survei eksternal) | | | | | |
| Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | a | Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) | | | | | |
| | b | Opini BPK | WTP | | | | |
| Kualitas Pelayanan Publik | a | Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) | | | | | |

h) Prioritas yang Harus Dipelihara

| Sasaran | Indikator | Target | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Memantapkan akuntabilitas kinerja | Nilai LAKIP | | | | | |
| Menjaga pemerintahan yang bersih | Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah | | | | | |

2. Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, antara lain:

| Area Perubahan | | Kegiatan | |
|----------------|---|--|---|
| 1 | Manajemen Perubahan | a | Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2017 - 2021 |
| | | b | Koordinasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi |
| | | c | Sosialisasi Reformasi Birokrasi |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang - undangan | Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan | |
| 3 | Penataan Tata Laksana | a | Identifikasi proses bisnis organisasi |
| | | b | Penyusunan SOP |
| | | c | E-government |
| | | d | Penyusunan rencana pengembangan e-government |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | e | Pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll) |
| | | f | Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) |
| | | g | Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) |
| | | h | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik |
| 4 | Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur | a | Analisis jabatan dan beban kerja (review) |
| | | b | Penyusunan formasi pegawai |
| | | c | Penerimaan pegawai secara transparan |
| | | d | Penyusunan standar kompetensi jabatan |
| | | e | Assesment pegawai |
| | | f | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi |
| | | g | Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi |
| | | h | Penilaian kinerja individu |
| | | i | Penegakan aturan disiplin |
| | | j | Evaluasi jabatan |
| | | k | Pemuthakiran sistem informasi kepegawaian |
| 5 | Penguatan Pengawasan | a | Kebijakan penanganan gratifikasi |
| | | b | Penerapan SPIP |
| | | c | Penanganan pengaduan masyarakat |
| | | d | Implementasi whistle-blowing system |
| | | e | Penanganan benturan kepentingan |
| | | f | Pembangunan zona integritas |
| | | g | Pembinaan APIP |
| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | a | Penyusunan Standar Pelayanan (SP) |
| | | b | Pelatihan budaya pelayanan prima |
| | | c | Pembangunan dan pengembangan pelayanan terpadu |
| | | d | Inovasi pelayanan |
| | | e | Penanganan pengaduan pelayanan |
| | | f | Survey kepuasan masyarakat |
| | | g | Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik |

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan pengamatan dokumen administrasi dan/atau perilaku pegawai pada unit kerja, pengumpulan data/ laporan, dan rapat/pertemuan dengan para pejabat terkait. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan cara menelaah, menganalisis data/laporan, dan penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Monitoring dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan tim terkait, dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi.

BAB V PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2017-2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang

baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI WAKATOBI,

Ttd/Cap

ARHAWI